

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB V dinamika politik yang terjadi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam perumusan peraturan daerah tentang APBD di Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya hubungan intraksi yang saling berkoordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD. Yang berawal dari pembentukan KUA-PPAS dan keterpaduan RKA dan kesepakatan Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung.
2. Sementara itu dalam hal interdependensi masih ada dominasi dan transaksi politik antar lembaga dalam perumusan sampai penetapan peraturan daerah. Dominasi yang terjadi antara eksekutif dan legislatif dalam hal rancangan peraturan daerah. Lembaga eksekutif masih tampak mendominasi dalam hal inisiatif dan masih ada sebagian anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang tidak mengetahui, mengerti, dan memahami menggunakan hak inisiatif.
3. Negosiasi (*lobbying*) masih kental terasa dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Lembaga legislatif (DPRD) tidak memiliki kewenangan

untuk membuat rencana kerja, namun legislatif bisa merubah pagu anggaran maupun jenis kegiatan yang diinginkan anggota dewan, ini yang menyebabkan negosiasi negatif sering terjadi.

4. Mengenai kekurangan penelitian ini, peneliti tidak dapat mengikuti pelaksanaan proses penyusunan RAPBD secara langsung dari terbentuknya RKPD-KUA-PPAS sampai penetapan RAPBD. Peneliti hanya mendapatkan data dan keterangan mengenai penyusunan RAPBD dari informan

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif hendaknya meningkatkan instensitas pembinaan bagi anggota dewan agar dapat lebih memperhatikan kesetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aktor politik yang mendengarkan aspirasi masyarakat.
2. Untuk kembali meningkatkan kualitas hubungan politik antara eksekutif dan legislatif, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif menjalin negosiasi positif yang mementingkan kepentingan publik.
3. Sebaiknya dalam penelitian sejenis, peneliti membutuhkan waktu yang panjang, agar dapat mengikuti pelaksanaan proses penyusunan RAPBD secara langsung dan memperoleh data yang lebih jelas.